

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GRIYA HARMONI WARGA DI KOTA TANGERANG

Studi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota
Tangerang

Galih Pambudi¹, Dafyar Eliadi H², M Rosul Asmawi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan Griya Harmoni Warga (GHW) di Kota Tangerang, yang menjadi manifestasi komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik inklusif. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis keterlibatan warga di setiap tahapan proyek, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas serta keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam GHW bervariasi di setiap dimensi. Pada pengambilan keputusan, masyarakat aktif menyuarakan aspirasi lokasi dan desain multifungsi melalui Musrenbang, yang diakomodasi pemerintah meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan birokrasi. Dalam pelaksanaan program, semangat gotong royong dan inisiatif kolektif warga sangat menonjol, didukung oleh fasilitasi aktif pemerintah. Pemanfaatan GHW juga cukup tinggi untuk berbagai kegiatan sosial, meskipun belum merata di seluruh lapisan masyarakat dan masih memerlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif. Kendati demikian, partisipasi dalam evaluasi masih bersifat informal dan belum terintegrasi dalam sistem formal pemerintah. Faktor pendukung partisipasi meliputi adanya ruang diskusi terbuka, komitmen birokrasi yang responsif, peran vital tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi, relevansi fungsional GHW dengan kebutuhan warga, serta kuatnya semangat gotong royong. Di sisi lain, faktor penghambat melibatkan keterbatasan otoritas masyarakat dalam keputusan final, kurangnya mekanisme partisipasi formal dalam evaluasi, kesenjangan informasi dan koordinasi internal, dominasi pendekatan birokratis dalam evaluasi, serta inisiatif yang belum terdistribusi merata di kalangan warga. Pembangunan GHW di Kota Tangerang merepresentasikan model partisipasi yang menjanjikan, namun masih menghadapi tantangan dalam mencapai pemberdayaan penuh masyarakat. Saran yang diajukan mencakup penguatan mekanisme evaluasi partisipatif, peningkatan kualitas sosialisasi, pemberdayaan kapasitas masyarakat, serta integrasi inisiatif informal ke dalam kerangka formal guna memastikan keberlanjutan dan dampak sosial yang optimal dari fasilitas publik.

Kata kunci: Partisi Masyarakat, Griya Harmoni Warga

Abstract

*This study examines in depth community participation in the development of *Griya Harmoni Warga* (GHW) in Tangerang City, a project representing the government's commitment to providing inclusive public facilities. Employing a qualitative approach, the study analyzes resident involvement across all project stages – from decision-making and program implementation to the utilization of the completed facility and subsequent evaluation. The primary focus is to identify the enabling and inhibiting factors affecting the quality and sustainability of community participation in this community-based development initiative. The findings reveal that community participation in the GHW project varies across different dimensions. Regarding decision-making, residents actively voiced their aspirations concerning the facility's location and multifunctional design through the *Musrenbang* (development planning deliberation) process; the government accommodated these views, although the final decision remained with the bureaucracy. During program implementation, a spirit of *gotong royong* (mutual cooperation) and collective resident initiative was prominent, supported by active government facilitation. GHW utilization for various social activities is high, though not yet evenly distributed across all segments of society, indicating a need for more effective outreach strategies. However, participation in the evaluation phase remains informal and has not yet been integrated into the government's formal systems. Enabling factors include open discussion forums, a responsive bureaucratic commitment, the vital role of community leaders as communication bridges, the facility's functional relevance to residents' needs, and a strong spirit of mutual cooperation. Conversely, inhibiting factors include limited community authority in final decision-making, the absence of formal participatory mechanisms for evaluation, information gaps and internal coordination issues, the dominance of bureaucratic approaches in evaluation, and uneven distribution of initiative among residents. The GHW development in Tangerang City represents a promising model of participation, yet it faces challenges in achieving full community empowerment. Recommendations include strengthening participatory evaluation mechanisms, improving the quality of outreach and information dissemination, building community capacity, and integrating informal initiatives into formal frameworks to ensure the facility's sustainability and optimal social impact.*

Keywords: Community Partition, Griya Harmoni Warga

A. Pendahuluan

Pembangunan berbasis komunitas telah menjadi pendekatan strategis dalam menciptakan kota yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan suatu program, termasuk dalam penyediaan sarana interaksi sosial seperti pusat komunitas. Studi yang dilakukan oleh (Heri A dan Supardal, 2024), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencerminkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap kemajuan wilayahnya, yang terlihat dari keterlibatan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Dalam studinya (Harfis et al., 2019) mengidentifikasi beberapa penghambat partisipasi masyarakat, seperti kurangnya informasi tentang program pembangunan, dan minimnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa tidak hanya meningkatkan kualitas hasil pembangunan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga terhadap fasilitas yang dibangun (Latif et al., 2019). Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan pusat komunitas di perkotaan, seperti di Kota Tangerang, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat yang telah terbukti efektif di wilayah lain dapat diadaptasi dan diterapkan. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, diharapkan pusat komunitas tersebut dapat benar-benar menjadi ruang bersama yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Kota Tangerang sebagai kota dengan 13 kecamatan dan 104 kelurahan telah menunjukkan komitmennya terhadap penguatan komunitas melalui penyediaan sarana dan prasarana berbasis masyarakat. Sejak tahun 2021 hingga 2024, telah dibangun pusat komunitas yang pada awalnya disebut Community Centre. Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Griya Harmoni Warga, yang bukan hanya perubahan nama semata, melainkan mencerminkan filosofi baru sebagai tempat untuk membangun keharmonisan sosial, memperkuat kohesi warga, serta menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Penamaan ini memiliki makna mendalam: “Griya” melambangkan tempat yang akrab dan bersahabat, “Harmoni” menunjukkan keseimbangan dan keselarasan sosial, dan “Warga” menegaskan bahwa tempat ini milik bersama seluruh lapisan masyarakat. Perubahan branding dari Community Centre menjadi Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang mencerminkan semangat pembangunan kota yang berorientasi pada nilai-nilai inklusivitas dan pemberdayaan sosial. Transformasi ini tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga representasi dari upaya memperkuat modal sosial di tengah masyarakat. Modal sosial yang terdiri dari nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan sosial memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan berbasis komunitas (Rahmatullah et al., 2023). Keberadaan Griya Harmoni Warga sebagai ruang interaksi sosial diharapkan dapat memperkuat jaringan kepercayaan dan solidaritas antar warga, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kota. Dengan demikian, pembangunan pusat komunitas ini menjadi instrumen strategis dalam membangun dan menguatkan modal sosial yang esensial bagi keberhasilan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang sebagai pusat komunitas didasarkan pada upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik yang inklusif, partisipatif, dan representatif bagi kegiatan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 571 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Luasan Tanah untuk Pengadaan Tanah Pusat Komunitas di Kota Tangerang, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan pusat komunitas di setiap kelurahan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, berkreasi, dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan strategis dari pembangunan Griya Harmoni Warga mencakup peningkatan kualitas interaksi sosial, penguatan kohesi sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan hadirnya Griya Harmoni Warga, diharapkan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap ruang sosial yang

dapat digunakan secara produktif, sekaligus mendorong lahirnya komunitas-komunitas aktif yang berkontribusi dalam pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Pembangunan Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang pada kurun waktu 2021 hingga 2024 merupakan bagian dari program strategis pemerintah daerah dalam menyediakan pusat komunitas yang representatif di lingkungan kelurahan. Proses pembangunan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga (rekanan pelaksana), sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 26 unit Griya Harmoni Warga telah berhasil dibangun dan tersebar di berbagai kelurahan, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang layak dan berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pemberdayaan, serta pengembangan komunitas lokal. Keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan fisik pembangunan ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sarana yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Menurut (Adi, 2023), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan aktif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan sosial sebagai bentuk pemberdayaan. (Suharto, 2018) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan melalui proses yang memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif dan memengaruhi hasil pembangunan. Menurut (Adi, 2023), partisipasi masyarakat mencakup proses identifikasi masalah secara partisipatif, penyusunan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal, pelaksanaan program yang berbasis gotong royong, serta evaluasi yang dilakukan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan bottom-up, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Dalam pembangunan Griya Harmoni Warga, prinsip ini tampak pada proses diskusi warga, musyawarah RT/RW, serta keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik dan pengelolaan fasilitas sosial yang ada. Lebih lanjut, (Suharto, 2018) menegaskan bahwa partisipasi merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengambil inisiatif dan memengaruhi hasil pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya diminta persetujuannya, tetapi diberikan ruang yang luas untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks Griya Harmoni Warga, hal ini tercermin dari keterlibatan aktif tokoh masyarakat, karang taruna, kelompok ibu-ibu PKK, hingga anak muda, yang turut serta menyuarakan kebutuhan, merancang bentuk fasilitas, serta mengorganisir kegiatan sosial di dalamnya.

Dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, pandangan (Sumodiningrat, 2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sarana strategis untuk menciptakan keadilan sosial. Pelibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Griya Harmoni Warga, prinsip ini tercermin dalam mekanisme musyawarah dan rembuk warga yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menentukan fungsi, bentuk, dan program kegiatan di

dalam fasilitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya sebagai sarana teknis, melainkan sebagai alat distribusi keadilan sosial yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan ruang dan suara dalam pembangunan. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam proyek ini menjadi medium penting untuk meratakan akses dan manfaat pembangunan. Ketika masyarakat ikut andil dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas publik, hasil pembangunan tidak lagi bersifat elitis atau eksklusif, melainkan inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga. Inilah yang ditekankan oleh (Sumodiningrat, 2020) bahwa partisipasi memiliki potensi besar untuk meruntuhkan sekat-sekat ketimpangan sosial di tingkat lokal. Partisipasi juga berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat bukan hanya dilibatkan untuk memberikan ide, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengawasi jalannya proses pembangunan, memastikan penggunaan anggaran yang tepat, dan melakukan evaluasi terhadap manfaat fasilitas publik yang dibangun. Dalam konteks inilah, pembangunan Griya Harmoni menjadi cerminan dari tata kelola lokal yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang diharapkan oleh teori administrasi publik partisipatif. Partisipasi adalah bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk didengar dan dilibatkan dalam kebijakan publik (Nugroho, 2020). Partisipasi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat karena memungkinkan warga untuk merasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Partisipasi masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh (Nugroho, 2020), merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat untuk didengar dan dilibatkan dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan Griya Harmoni Warga, konsep ini menjadi sangat relevan. Proyek pembangunan berbasis masyarakat seperti ini hanya akan berhasil apabila masyarakat merasa bahwa aspirasi dan pandangannya diperhitungkan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan kata lain, pembangunan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah atau elit lokal, tetapi merupakan hasil sinergi antara warga dan pemerintah setempat.

Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat merupakan landasan normatif yang mengarahkan bagaimana proses keterlibatan warga dalam pembangunan seharusnya dilakukan secara adil, efektif, dan berkelanjutan. Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh (Irawan, 2021), partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari keterlibatan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta evaluasi program pembangunan. Mereka menekankan bahwa partisipasi yang ideal adalah yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memiliki kendali terhadap proses pembangunan. Lebih lanjut, (Soetomo, 2017) menyatakan bahwa partisipasi harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan dan kesetaraan, yang berarti bahwa keterlibatan warga dalam pembangunan tidak boleh dipaksakan dan setiap individu memiliki hak suara yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga, bukan sekadar formalitas prosedural. Senada dengan itu, (Mardikanto, 2019) mengemukakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam partisipasi masyarakat.

Masyarakat harus mendapatkan informasi yang memadai dan memiliki akses terhadap proses-proses pengambilan keputusan agar dapat berpartisipasi secara bermakna. Jika masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami apa yang sedang direncanakan atau dijalankan, maka partisipasi akan menjadi semu.

Pembangunan Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya ruang publik yang inklusif, partisipatif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencerminkan upaya strategis dalam menata kehidupan sosial masyarakat di lingkungan urban yang semakin kompleks. Dalam konteks kota yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan tantangan sosial yang beragam, keberadaan GHW menjadi solusi alternatif untuk menghadirkan fasilitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara setara. GHW dirancang sebagai ruang interaksi sosial dan pusat kegiatan komunitas yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal. Melalui penyediaan fasilitas seperti balai warga, posyandu, sekretariat bersama RT/RW, dan playground, GHW memungkinkan terselenggaranya berbagai aktivitas, mulai dari diskusi warga, pelayanan kesehatan ibu dan anak, rapat koordinasi lingkungan, hingga kegiatan rekreasi bagi anak-anak. Kehadiran ruang-ruang ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat semangat gotong royong, serta memperkuat jaringan sosial antarwarga. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, kegiatan pasca-pembangunan seperti pengelolaan dan pemanfaatan Griya Harmoni Warga akan lebih berkelanjutan. Komunitas lokal akan terdorong membentuk kelompok pengelola yang aktif menghidupkan fasilitas ini dengan berbagai kegiatan edukatif, budaya, ekonomi kreatif, maupun sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pembangunan Griya Harmoni Warga bukan hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat infrastruktur sosial yang berdaya tahan dan inklusif. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan fasilitas. Hal ini sejalan dengan temuan (Harisoesyanti & Annisah, 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan program pengembangan masyarakat di komunitas perkotaan, terutama dalam mengatasi keterbatasan ruang publik.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran Griya Harmoni Warga sebagai simbol transformasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni dalam masyarakat urban. Sebagaimana dikemukakan oleh (Yuniarto, 2018), partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berbasis komunitas dapat memperkuat modal sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan demikian, Griya Harmoni Warga tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antar warga. Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan Griya Harmoni Warga?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Griya Harmoni Warga?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan Griya Harmoni Warga?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan Griya Harmoni Warga?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Griya Harmoni Warga?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan alami, dengan menekankan pada makna, pengalaman, serta proses yang terjadi di dalamnya. Dengan informan yang diwawancarai sebanyak 8 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, temuan lapangan di Kota Tangerang menunjukkan bahwa semangat partisipatif ini mulai membumi. Tergambar bahwa proses Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan. Warga aktif berdiskusi sejak di forum tingkat RW, menyampaikan lokasi ideal GHW yang mudah diakses. Dari sinilah terlihat bahwa masyarakat tak hanya ikut-ikutan, tapi punya pengetahuan yang dalam. Keinginan warga terhadap GHW bukan hanya soal bangunan, tapi juga fungsi sosialnya. Mereka berharap agar GHW bisa multifungsi menjadi ruang kegiatan anak muda, posyandu, hingga pelatihan warga. Bahkan ada yang menyarankan agar desain ruangnya fleksibel dan tidak terlalu kaku. Aspirasi seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat punya bayangan tentang bagaimana sebuah ruang publik bisa hidup dan berkembang bersama komunitasnya. Proses selanjutnya dikawal oleh lembaga teknis. Bappeda Kota Tangerang mengungkapkan bahwa mereka mengumpulkan dan merumuskan program berdasarkan Musrenbang. Mereka bekerja sama erat dengan Disperkimtan, yang kemudian mengeksekusi pembangunan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya alur koordinasi yang sistematis aspirasi dari bawah diolah secara terstruktur hingga jadi kebijakan di atas. Dari sisi teknis, Bidang Bangunan Disperkimtan menekankan bahwa pembangunan GHW diawali dari data Musrenbang dan diverifikasi langsung ke lapangan. Yang menarik, bahwa dialog

dengan warga sering kali menghasilkan informasi tambahan yang lebih kaya dari dokumen resmi. Ini membuat proses perencanaan jadi lebih adaptif, bukan sekadar administratif. Hal yang sama disampaikan oleh Seksi Administrasi Pertanahan Disperkimtan yang menggarisbawahi pentingnya mengkaji kelayakan lahan berdasarkan usulan masyarakat. Tidak hanya melihat dari sisi legalitas dan status tanah, tapi juga mempertimbangkan masukan warga agar potensi konflik bisa diminimalkan sejak awal. Peneliti menilai bahwa pendekatan ini menjadi wujud nyata dari kebijakan yang berpijak pada realitas sosial.

2. Partisipasi warga dalam pelaksanaan Program Pembangunan Griya Harmoni Warga benar-benar terasa nyata, terutama ketika melihat bagaimana mereka terlibat langsung dalam proses pembangunan fisiknya. Tidak sekadar hadir atau memberikan dukungan moral, warga ikut turun tangan membantu menyediakan tenaga kerja secara sukarela. Semua itu dilakukan dengan semangat gotong royong yang kental dan rasa tanggung jawab bersama. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan bukan sekadar mempercepat dan mempermudah realisasi pembangunan, tetapi lebih dari itu, menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai kebersamaan. Dalam program pembangunan Griya Harmoni Warga, hal ini tercermin dari bagaimana masyarakat tidak hanya terlibat karena kewajiban, melainkan karena adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tumbuh dari dalam. Program ini pun tidak lagi dilihat sebagai sekadar kegiatan pembangunan fisik, tetapi menjadi proses sosial yang membangun kembali kepercayaan, solidaritas, dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Inilah nilai penting bukan hanya membentuk bangunan, tetapi juga membentuk jiwa kolektif warga yang lebih harmonis. Pola kolaboratif yang terbentuk dalam pelaksanaan program GHW mencerminkan praktik baik partisipasi masyarakat yang ideal. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam studi (Maulidah, R., & Surya, 2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan program berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta implementasi. Partisipasi warga tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menciptakan rasa memiliki yang menjadi kunci keberlanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menilai bahwa keberhasilan program Griya Harmoni Warga bukan semata hasil dari perencanaan struktural pemerintah, tetapi juga buah dari kemitraan sejajar antara masyarakat dan pemerintah yang saling percaya, terbuka, dan bekerja sama dalam semangat gotong royong.
3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Griya Harmoni Warga juga mencerminkan prinsip keadilan sosial. Semua lapisan warga, dari kader hingga pengurus RT RW dan karang taruna, turut memanfaatkan fasilitas ini secara bergiliran dan terbuka. Ruang ini menjadi milik bersama, bukan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Warga merasa dilibatkan bukan hanya dalam membangun, tapi juga dalam merawat dan menghidupkan fungsi dari hasil pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan (Sumodiningrat, 2020), hal seperti ini menjadi indikator kuat bahwa pembangunan tersebut bersifat partisipatif dan berkeadilan. Lebih dari

sekadar gedung fisik diharapkan Griya Harmoni Warga menjadi simbol kebersamaan warga. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan, sekaligus memperkuat jaringan sosial antar warga. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan penggunaan fasilitas. Ketika warga merasa bahwa hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari, maka semangat untuk menjaga, memanfaatkan, dan bahkan mengembangkan fungsi ruang tersebut akan tumbuh secara alami. Inilah makna partisipasi yang sesungguhnya dari proses, hasil, hingga pemanfaatan yang berpihak pada masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Masyarakat di Kota Tangerang dalam dimensi partisipasi pengambilan keputusan, telah menunjukkan partisipasi yang proaktif dan bermakna pada tahap inisiasi dan perencanaan awal Griya Harmoni Warga. Adanya ruang diskusi yang terbuka dan terintegrasi dalam forum Musrenbang di tingkat RW dan kelurahan menjadi kanal efektif bagi warga untuk menyuarakan aspirasi substantif, terutama terkait lokasi dan fungsi multifungsi Griya harmoni Warga.
2. Partisipasi masyarakat dalam dimensi partisipasi pelaksanaan program, terwujud dalam bentuk yang sangat konkret dan aktif. Semangat gotong royong dan inisiatif kolektif warga untuk membantu dalam pengawasan, menjaga keamanan lokasi, dan bahkan dukungan administratif seperti verifikasi lahan, menunjukkan adanya rasa kepemilikan yang kuat terhadap Griya Harmoni Warga.
3. Pembangunan Griya Harmoni Warga dalam dimensi partisipasi pemanfaatan hasil pembangunan telah berhasil diadopsi sebagai ruang publik multifungsi yang hidup, digunakan untuk beragam kegiatan sosial seperti Posyandu, rapat RT/RW, hingga kegiatan Karang Taruna. Ini mencerminkan bahwa fasilitas tersebut relevan dengan kebutuhan sehari-hari warga, menumbuhkan rasa memiliki yang kuat.
4. Partisipasi masyarakat dalam dimensi evaluasi, teridentifikasi masih berada pada tahap yang belum optimal dan cenderung informal. Meskipun warga menunjukkan kepedulian dengan menyampaikan masukan dan saran perbaikan secara lisan, belum ada mekanisme formal dan terstruktur, seperti forum evaluasi khusus atau survei kepuasan, untuk menampung dan mengintegrasikan suara mereka. Evaluasi cenderung didominasi oleh pendekatan internal dan teknokratis pemerintah, sehingga dimensi sosial seperti kepuasan pengguna dan kebermanfaatan fasilitas dari perspektif warga belum tergali secara maksimal.
5. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan Griya Harmoni Warga di Kota Tangerang didukung oleh adanya ruang diskusi yang terbuka dan saluran partisipasi yang jelas, seperti forum musrenbang, yang memungkinkan aspirasi warga terhimpun sejak tahap pengambilan keputusan. Komitmen birokrasi pemerintah daerah untuk mengakomodasi masukan dan menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan warga, termasuk dalam menjaga harmoni sosial di lapangan, turut memperkuat keterlibatan.

Referensi

Buku

- Adi, I. R. (2023). *Praktik Komunitas, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi 2023)*. Rajawali Press.
- Agustina, I. H. (2002). Upaya Pelestarian Situ Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Situ Cipondoh Kota Tangerang). *Mimbar*, XVIII(1), 106–120.
- Ahmad, S. N. A., Latipah, S., & Oktaviani, I. (2023). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kampung Iklim Di Wilayah Kota Tangerang Analysis Of Community Empowerment In The Climate Village Program In The Tangerang City Peningkatan suhu di bumi atau sering disebut dengan Global Warming akan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 1(2), 161–183.
- Asmaria, Lies Kumara Dewi, M. F. A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Gemma Tapis Berseri Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Khazanah Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/ks.v3i1.8156>
- Astuti, D. (2022). Peran Partisipasi Publik dalam Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 8(1), 45–56.
- Dwiningrum, S. I. A. (2019). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gajah Mada Press.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang*. Universitas Gajah Mada Press.
- Edi, S. (2018). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Faisal, S. (2019). *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press.
- Handayani, S., & Santoso, R. (2020). Peran Masyarakat Lokal dalam Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 112–120.
- Harbani Pasalong. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.20>
- Hughes, O. E. (2018). *Public Management and Administration. Terjemahan Indonesia*. Indeks.
- Irawan, R. D. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Deepublish.
- Mardikanto, T. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Remaja Rosdakarya.
- Mustansyir, R. (2022). *Governance dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo
- Pranadji, T. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. IPB Preess.

- Prawirosentono, S. (2020). Pengembangan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Refika Aditama.
- Rahardjo, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Pustaka Pelajar.
- Siagian, S. P. (2019). Teori Administrasi Publik Kontemporer. Bumi Aksara.
- Soetomo. (2017). Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya. Pustaka Pelajar.
- Sogiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (2020). Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan. LP3ES.
- Suwandi, S., & Marzuki, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Kencana.
- Taufik, A. (2021). Reformasi Administrasi Publik dan Tantangan Otonomi Daerah. Deepublish.
- Thoha, M. (2016). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Prenadamedia Group.
- Totok Mardikanto, P. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Yeremias, K. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu (Ketiga). Gava Media.

Jurnal

- Harisoesyanti, K. S., & Annisah, A. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Masyarakat Di Komunitas Miskin Perkotaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 220–232. <https://doi.org/10.21632/jpmi.2.2.220-232>
- Heri, S. dan. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa INFO. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 1377–1378. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Irwan, M. F. M., Muhibuddin, A., & Saleh, H. (2023). Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(1), 90–93.
- Islamy, M. I. (2020). Efektivitas Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 123–135.
- Karimah, N. R. L., & Sumpena, D. (2023). Program Kampung Berdaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Kesejahteraan. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3), 357–378. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i3.24239>
- Koswara, D., Mulyadi, E., & Suhaya, S. (2021). Hubungan Kepemimpinan Dan Ekspektasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ketapang Kota Tangerang. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 87–95. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1490>
- Kusnadi, D. (2021). Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Fasilitas Publik di Perkotaan. *Jurnal Pemberdayaan Sosial Masyarakat*, 7(1), 44–58.

- Kuswati, S. (2018). Peran Sektor Swasta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032 (Studi Kasus: Kecamatan Tangerang). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1).
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Maulana, I., & Sunarti, S. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i1.1250>
- Maulidah, R., & Surya, Y. (2021). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), 413–425.
- Novian, M. N., & Machdum, S. V. (2021). Pembangunan Partisipatif Di Kota Tangerang Selatan Melalui Program Tangel Youth Planner. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 173–181. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18690>
- Nugroho, E., & Suryani, I. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pembangunan Desa Inklusif. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15(1), 34–45.
- Nurjanah, S. (2021). Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 89–102.
- Puri, R. S., Murodi, A., & Kurniawan, I. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Di Kelurahan Margasri, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(2), 86–94. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i2.3217>
- Puspitasari, D. (2020). Meningkatkan Akuntabilitas Program Melalui Evaluasi Partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–156.
- Putri, D., & Amelia, R. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112–125.
- Putri, I., Azis, A., Sunu, N., & Giriwati, S. (2024). Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kotalama , Kota Malang The Role of Community Participation in Improving the Quality of Slum Settlement Areas in Kotalama Urban Village , Malang City. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 125–129. <https://doi.org/DOI> <http://dx.doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.377>.
- Rachmawati, F., & Widodo, A. (2021). Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 77–89.
- Rahmatullah, Achmad Fauzi Kusmin, & Hendrawan. (2023). Studi Literatur : Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Arajang*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2804>
- Rahmawati, N. (2022). Pembangunan Berbasis Komunitas: Strategi Partisipatif dalam Pengelolaan Ruang Publik di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 67–81.

- Saputra, A., & Lestari, D. (2021). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 12(2), 150–165.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 56–74. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8814>
- Wahyuni, Y. T., & Manaf, A. (2017). Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(4), 472. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i4.13511>
- Wulandari, R., & Putra, R. (2020). Peran Forum Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Lokal. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(1), 35–48.
- Yuniarto, P. R. (2018). Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 20(3), 313–328.